

Hasil Laporan Evaluasi

Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Nama Inspektur : Ivan Santoso, Ak., M.Ak
 Waktu Pengisian : 2018-04-27 15:52
 Waktu Pengevaluasian :
 Tahap : Tahap 3 *)
 Tahun Penilaian : 2018

Penilaian		Penjelasan		Jawaban	Nilai	Presentase (Bobot / Nilai)	Nama/ Nomor Dokumen Pendukung
A. PROSES (60).					58.46	97.43%	
I.Manajemen Perubahan					5	100%	
1. Tim Reformasi Birokrasi					1	100%	
	a	Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi	A	1		Telah ditetapkan SK Menkominfo No.65 th 2018 tentang Tim RB Kominfo 2018
	b	Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja	A	1		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan program kerja dan progress pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kominfo secara berkala. 1. Undangan, Daftar Hadir dan notulensi Rapat Koordinasi Pokja RB 2. Rencana Aksi Pokja RB
	c	Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A	1		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan program kerja dan progress pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kominfo secara berkala. A. Laporan Monev RB Juni dan Des 2017 B. Laporan Pokja capaian 2018
2. Road Map Reformasi Birokrasi					1	100%	
	a	Road Map telah disusun dan diformalkan	Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya	1		Dokumen Pedoman Menteri Kominfo 5 Tahun 2016 Tentang Roadmap RB Kominfo Tahun 2015-2019
	b	Road Map telah mencakup 8 area perubahan	a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada	A	1		Mencakup 8 (delapan) area perubahan. Roadmap terlampir
	c	Road Map telah mencakup "quick win"	a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win	A	1		Road Map RB telah mencakup Quick Win sebagaimana dituangkan dalam Bab III Program Quickwin. Quick Win 2017 sudah diusulkan oleh Sekjen kepada Menteri Kominfo pada Bulan April 2017 dan Juni 2017. Bukti : 1 Nota Dinas Usulan Quick Win tahun 2017 2. Draft SK Menteri Kominfo tentang Penetapan Quick Win tahun 2017.
	d	Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi	a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map	A	1		Semua unit kerja telah dilibatkan melalui keanggotaan SK RB yang diwakili seluruh unit kerja. Bukti dukung : a. SK POKJA RB pada poin 1a b. Undangan rapat rb c. Pelaksanaan rapat konsinyering penyusunan roadmap RB Kominfo dan daftar hadir d. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor 1984/SJ/KP.01.06/12/2015 tentang Penyusunan Roadmap RB Kominfo e. Road Map RB 2015-2019
	e	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map	A	1		Sosialisasi dan internalisasi RB sudah dilakukan melalui rapat, konsinyering, banner, walpaper, dan website. Bukti dukung : a. Distribusi Roadmap melalui grup WhatsApp b. Website RB Kominfo yang sudah dilengkapi Road Map RB Kominfo c. Blast Email kepada Seluruh pegawai d. Pemanfaatan Radio, TV Plasma, short clip dan Infografis

3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi				2	100%	
	a	PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	A	1	Seluruh akti?tas PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik, selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh unit organisasi baik melalui surat, notadinas, rapat - rapat pokja yang diwakili oleh seluruh unit kerja maupun melalui website Bukti dukung : Undangan rapat, Nota dinas kepada seluruh pokja, foto- foto pelaksanaan rapat pmprb dan notulensi. note: Jadwal PMPRB dari Juni 2017 s.d. April 2018 tentang: 1. Rapat Pengumpulan Dokumen Capaian RB tanggal 24 April 2018 2. Validasi Dokumen oleh Tim Asesor PMPRB tanggal 27 April 2018 3. Upload Dokumen ke Website oleh PIC Pokja RB Januari - April 2018 4. Submit LKE PMPRB ke Menpan oleh Irjen dan Sekjen tanggal 30 April 2018
	b	Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi	A	1	Seluruh akti?tas PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik, selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh unit organisasi baik melalui website dan rapat - rapat pokja yang diwakili oleh seluruh unit kerja maupun melalui website Bukti dukung : 1.Undangan rapat, daftar hadir dan notulensi, foto- foto pelaksanaan rapat pmprb dan laporan. 2. Kegiatan PMPRB yang di upload di Website. 3. Pembahasan PMPRB di Rapat Koordinasi Sekretaris dan Kepala Biro/Pusat yang tercantum dalam notulensi Rapat. 4. Penyebaran Aktivitas PMPRB via WA grup.
	c	Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB	a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan	A	1	Pelatihan terhadap asesor telah dilakukan oleh 1. Kementerian PAN dan RB di Hotel Kemang, Jakarta Selatan pada Tahun 2012. 2. Pelatihan internal Kemkominfo yang dibuktikan dengan Laporan pelaksanaan pelatihan PMPRB Kemkominfo di Pustiknas - Ciputat pada tanggal 6 Maret 2013 3. Benchstorming standar penilaian pada LKE PMPRB dengan mengundang Narasumber dari Menpan. 3. Pelaksanaan Bimtek Asesor PMPRB pada tanggal 20 November 2017 yang dihadiri oleh Koordinator dan Tim Asesor PMPRB Kementerian Komunikasi dan Informatika
	d	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.	A	1	Pelaksanaan PMPRB mengikutsertakan pejabat struktural lapis kedua pada tanggal 24 dan 27 April 2017. Bukti dukung: Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Foto kegiatan.
	e	Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reuiu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?	a. Koordinator asesor telah melakukan reuiu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator asesor telah melakukan reuiu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator asesor belum melakukan reuiu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi	A	1	Reuiu telah dilakukan oleh Koordinator Asesor PMPRB terhadap seluruh kertas kerja pada tanggal 24 dan 27 April 2018 di Kementerian Kominfo Bukti dukung: 1.Undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Foto kegiatan. 2. LKE setiap Pokja yang telah direuiu
	f	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?	a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator asesor	A	1	Pengisian kertas kerja oleh para asesor telah mencapai kosensus pada tanggal 27 April 2018 di Kantor Kementerian Kominfo. Bukti Dukung: 1. LKE seluruh Pokja 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi.
	g	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A	1	Rencana Aksi dan Tindaklanjut telah dikomunikasikan melalui rapat-rapat monev RB dan surat (notadinas) ke seluruh satuan kerja. Bukti dukung : 1. melalui aktivitas PMPRB yang bertahap pada poin 3 a.b 2. Paparan Rencana Aksi seluruh Pokja Note: 1. Progress Tindak Lanjut Rekomendasi 2. Progress Rencana Aksi
4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja				1	100%	
	a	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A	1	Pimpinan tertinggi telah berperan aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dibuktikan dengan penugasan langsung kepada Eselon I dan II sebagai AP yang pada awalnya ditetapkan dg SK sekjen pada tahun 2014, menjadi SK Menteri pada tahun 2015. Pimpinan tertinggi juga secara aktif menghimbau para pegawai melalui email terkait semangat RB dan revolusi Mental dan mengagendakan progress RB pada rapat2 pimpinan Bukti dukung : a. Laporan Pelaksanaan Pelatihan "Change Leader sebagai Pelaku Revolusi Mental" b. SK Menteri 136 th 2015 tgg Agen Perubahan yang sebelumnya SK Sekjen Nomor 59 th 2014 d. Rencana aksi agen perubahan di masing-masing unit kerja e. Nota dinas Sekretaris Jenderal Nomor 574/SJ/OT.03.01/04/2016 Tentang Tindaklanjut Pelaksanaan program perubahan di Unit Kerja f. SK Menteri tentang Diklat Manajemen Perubahan angkatan 1 tahun 2016 dan angkatan 2 Tahun 2017 g. Keterlibatan Pimpinan Tinggi dalam Pengusulan QW h. Telah dilaksanakan temu pegawai pada tanggal 16 Januari 2018 yang melibatkan Seluruh pegawai dan pejabat pimpinan tinggi dan Menteri.
	b	Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi	A	1	Ada media komunikasi internal Kemkominfo, baik dari pimpinan tertinggi sampai pada jajaran pelaksana berupa media diskusi bebas pada portal, radio komunitas dan buku saku RB yg sudah dibagikan ke seluruh pegawai, dan website Kominfo yang memuat konten tentang RB Kominfo. Bukti dukung : 1. Capture portal dan diskusi bebas 2. website yang berisi konten rb 3. Screen shoot grup WhatsAP RB 4. Radio, TV Plasma, Website Kominfo 5. Acara temu Pegawai Kementerian Kominfo yang dilaksanakan Pada tanggal 16 Januari 2018

	c	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change	A	1		Sudah ada rapat kerja para agen perubahan dan membentuk nilai2 kementerian. Mengukur kesehatan budaya organisasi utk dapat ditindaklanjuti, rencana diklat berbasis rev.mental Bukti Dukung : a. Laporan pelaksanaan Pelatihan "Change Leader sebagai Pelaku Revolusi Mental" b.Draft SK Menteri tentang Penunjukan Agen Perubahan Satuan Kerja c. Hasil OCHI Kominfo d. Rencana Pelaksanaan Pelatihan Agen of Change di lingkungan Kominfo. e. SK Diklat Manajemen Perubahan Angkatan 1 tahun 2016 dan Angkatan 2 tahun 2017. f. Diklat Manajemen perubahan 2018 g. Pemilihan Agen Perubahan 2018
	Rencana Aksi		1. Penetapan QW Kementerian Kominfo tahun 2018 2. Pelaksanaan Workshop Agen Perubahan dan Diklat Teknis Manajemen Perubahan Tahun 2018 3. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana komunikasi dan informasi terkait RB, contoh portal, website Kominfo Sosialisasi dan Internalisasi nilai-nilai Kementerian secara terus menerus dengan optimalisasi peran agen perubahan 4. Pembentukan Lab Inovasi				
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					5	100%	
1. Harmonisasi					2.5	100%	
	a	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	A	1		Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang hasilnya sebagai berikut: 1. Identifikasi, analisa, dan pemetaan peraturan perundang-undangan bidang kominfo tahun 2005-2011; dan 2. Identifikasi, analisa, dan pemetaan peraturan perundang-undangan bidang kominfo tahun 2012- 2017 Selain itu, dalam rangka Reformasi Regulasi telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan untuk mengurangi jumlah regulasi bidang Kominfo: 1. Undangan, Absensi, Laporan 2. Nota Dinas ke Menteri 3. Rekapitulasi penelaahan regulasi
	b	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	A	1		Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis: A. Rekapitulasi Revisi Peraturan Perundang-Undangan Pada Tahun Tahun 2017-2018 Kelengkapan persyaratan berupa: 1. Rapat koordinasi (Undangan, Daftar Hadir, Laporan); 2. Konsultasi publik melalui website Kementerian Kominfo; 3. Kajian/policy paper; dan 4. Paraf Koordinasi.
2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan					2.5	100%	
	a	Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A	1		Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan dan persyaratan lengkap, didukung dengan: 1. Surat Edaran Sekjen No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kominfo (dalam rangka revisi untuk penyempurnaan) 2. SOP penyusunan peraturan perundang-undangan.
	b	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	A	1		Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala 3 bulan sekali pada TA. 2017-s.d April 2018, yaitu: 1. Und, Absensi, dan Laporan (B03) TA. 2017; 2. Und, Absensi, dan Laporan (B06) TA. 2017; 3. Und, Absensi, dan Laporan (B09) TA. 2017; 4. Und, Absensi, dan Laporan (B12) TA. 2017; 5. Und, Absensi, dan Laporan (B03) TA. 2018;
	Rencana Aksi		1. Inventarisasi, analisa, dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang Kominfo 2. analisa dalam rangka simplifikasi Peraturan Menteri (PM): a. Penelaahan terkait simplifikasi regulasi; b. Penyusunan Program kerangka regulasi (KARINA) 2. evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka simplifikasi, melalui evaluasi triwulan 2018 3. Melakukan harmonisasi dan penyusunan terhadap regulasi 4. Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan Amanat Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 5. Melakukan FGD dan konsultasi publik melalui website untuk melibatkan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 6. Penyampaian Indeks Hasil Survey Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Tahun 2017 7. Peningkatan Penilaian Pengelolaan JDih Kominfo secara nasional 8. Pencetakan Buku Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo tahun 2016-2017 9. Pemuktahiran website JDih Kominfo secara berkala				
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI					6	100%	
1. Evaluasi					3	100%	
	a	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organisasi	A	1		1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 2. Laporan Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 4. Laporan Hasil Penyusunan Grand Design Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 melalui tahapan: - Pengisian matriks mandat undang-undang bidang kominfo oleh setiap satuan kerja - FGD dengan para stakeholder yang terdiri dari praktisi dan akademisi bidang kominfo - Indepth interview dengan para pimpinan unit eselon I 5. Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang OTK Kemkominfo 6. Naskah Akademik Revitalisasi Organisasi Kemkominfo 7. Pedoman Proses Bisnis Kementerian Kominfo 8. Monitoring organisasi tahun 2017 9. Rancangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jabatan (SIMANJA)

	b	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi	A	1		1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 2. Laporan Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 (halaman 25-26) 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 (halaman 7) 4. Laporan Hasil Penyusunan Grand Design Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 melalui tahapan: - Pengisian matriks mandat undang-undang bidang kominfo oleh setiap satuan kerja - FGD dengan para stakeholder yang terdiri dari praktisi dan akademisi bidang kominfo - Indepth interview dengan para pimpinan unit eselon I 5. Seminar Peran Stategis Aplikasi Informatika Menghadapi Era Konvergensi Untuk Mengukur Jenjang Organisasi Di Ditjen APTIKA 6. Kajian Organisasi Pusat Data dan Sarana Informatika 7. Peta Jabatan Seluruh satuan kerja 8. Rancangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jabatan (SIMANJA)
	c	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja	A	1		1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 2. Laporan Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 4. Laporan Hasil Penyusunan Grand Design Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 melalui tahapan: - Pengisian matriks mandat undang-undang bidang kominfo oleh setiap satuan kerja - FGD dengan para stakeholder yang terdiri dari praktisi dan akademisi bidang kominfo - Indepth interview dengan para pimpinan unit eselon I 5. Analisis Duplikasi Fungsi Seluruh Satuan Kerja 6. Proses Bisnis Kementerian Kominfo 7. Monitoring organisasi 8. Rancangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jabatan (SIMANJA) 9. Matriks Output tugas dan fungsi Satuan Kerja 10. Naskah Akademik IKP, APTIKA, Balitbang SDM
	d	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja	A	1		1. Laporan Hasil Penyusunan Grand Design Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 melalui tahapan: - Pengisian matriks mandat undang-undang bidang kominfo oleh setiap satuan kerja - FGD dengan para stakeholder yang terdiri dari praktisi dan akademisi bidang kominfo - Indepth interview dengan para pimpinan unit eselon I 2. Evaluasi Seluruh Satuan Kerja Yang Berbeda Tujuan Namun Ditempatkan dalam Satu Kelompok 3. Proses Bisnis Kementerian Kominfo 4. Monitoring organisasi 5. Matriks Output tugas dan fungsi Satuan Kerja
	e	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja	A	1		1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 2. Laporan Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 4. Laporan Hasil Penyusunan Grand Design Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 melalui tahapan: - Pengisian matriks mandat undang-undang bidang kominfo oleh setiap satuan kerja - FGD dengan para stakeholder yang terdiri dari praktisi dan akademisi bidang kominfo - Indepth interview dengan para pimpinan unit eselon I 5. Hasil analisis jabatan dan beban kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2014 6. Usulan RPM Kominfo tentang SOTK yang sudah mengakomodir perbaikan Tusi berdasarkan hasil Anjab. 7. Evaluasi Jabatan Tahun 2017 8. Rancangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jabatan (SIMANJA)
	f	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja	A	1		1. Hasil evaluasi LAKIP 2013 2. Laporan evaluasi organisasi sesuai dengan PermenPAN No.67 tahun 2011 - Bukti laporan evaluasi organisasi berdasarkan Permen PAN RB tahun 2013. 3. Dokumen Rencana Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 4. Hasil analisis jabatan dan beban kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2014 5. Renstra Kominfo Nomor 21 Tahun 2016 6. Matriks Output Tugas dan Fungsi Satuan Kerja 5. Draft Peta Bisnis Proses yang sesuai dengan Renstra 2015 - 2019 6. Renstra Kominfo 2015 - 2019
	g	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja	A	1		1. Laporan Hasil Penyusunan Grand Design Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 melalui tahapan: - Pengisian matriks mandat undang-undang bidang kominfo oleh setiap satuan kerja - FGD dengan para stakeholder yang terdiri dari praktisi dan akademisi bidang kominfo - Indepth interview dengan para pimpinan unit eselon I 2. Usulan Perpres tentang Kementerian Kominfo telah mengakomodir mandat UU bidang Kominfo. 3. Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi Dengan Mandat Untuk Seluruh Satuan Kerja 4. Naskah Akademis Revitalisasi Organisasi Kemkominfo 5. Matriks Output Tugas dan Fungsi Satuan Kerja 6. (matriks mandat yang disusun oleh Konsultan Bpk. Nugroho)
	h	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Ya	1		1. Laporan Hasil Penyusunan Grand Design Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 melalui tahapan: - Pengisian matriks mandat undang-undang bidang kominfo oleh setiap satuan kerja - FGD dengan para stakeholder yang terdiri dari praktisi dan akademisi bidang kominfo - Indepth interview dengan para pimpinan unit eselon I 2. Proses Bisnis Kementerian Kominfo 3. Seminar Peran Stategis Aplikasi Informatika Menghadapi Era Konvergensi Untuk Mengukur Jenjang Organisasi Di Ditjen APTIKA 4. Nodin Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor 08/SJ.2/OT.01.01/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Siber Nasional 5. Surat Menteri Kominfo Nomor B-1219/M.KOMINFO/OT.01.01/09/2017 tanggal 22 September 2017 perihal Pembentukan Organisasi Badan Siber dan Sandi Negara 6. Notulensi Rapat Pembahasan BSSN 7. Perpres BSSN
	i	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Ya	1		1. Laporan Hasil Penyusunan Grand Design Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 melalui tahapan: - Pengisian matriks mandat undang-undang bidang kominfo oleh setiap satuan kerja - FGD dengan para stakeholder yang terdiri dari praktisi dan akademisi bidang kominfo - Indepth interview dengan para pimpinan unit eselon I 2. Seminar Peran Stategis Aplikasi Informatika Menghadapi Era Konvergensi Untuk Mengukur Jenjang Organisasi Di Ditjen APTIKA 3. Kajian Organisasi Pusat Data dan Sarana Informatika 4. Naskah Akademis Revitalisasi Organisasi Kemkominfo 5. Monitoring Organisasi Tahun 2017 6. Matriks Output Tugas dan Fungsi Satuan Kerja 7. Naskah Akademik Penataan Organisasi BP3TI, IKP, APTIKA, Balitbang, UPT BPSDMP, UPT BP3TI

		2. Penataan			3	100%	
	a	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A	1		1. Usulan penataan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor : B-948/M.KOMINFO/OT.01.01/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal usulan penataan kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan telah dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 24 Februari 2015 dan 11 Maret 2015. 2. Draft Perpres telah difinalisasi oleh Kemenpan-RB tanggal 2 April 2015 dan telah disampaikan kepada Presiden sesuai surat nomor B/1277/M.PAN-RB/4/2015 tanggal 10 April 2015. 3. Telah disusun draft Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang OTK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 4. Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Permen Kominfo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika 6. Usulan Penataan Organisasi Kementerian Kominfo dengan Surat Menteri Kominfo Nomor B-1208/M.KOMINFO/OT.01.01/09/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Penataan Organisasi Kementerian Kominfo yang telah dilakukan pembahasan terakhir dengan Kementerian PANRB tanggal 8 Maret 2018 (menunggu Surat Persetujuan Penataan Organisasi Kominfo dari Menteri PANRB). Dari hasil penataan organisasi Kementerian Kominfo terdapat pengurangan 1 Eselon II, 2 Eselon III, dan 3 Eselon IV 7. Surat Menteri PANRB Nomor B/679/M.KT.01/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja BP3TI 8. UPT BPPTIK sedang dalam proses penetapan oleh Menteri Kominfo 9. UPT Monfrek sedang dalam proses pengundangan oleh Kementerian Kumham
		Rencana Aksi	1. Internalisasi Struktur organisasi baru 2. penyusunan Anjab dan Evjab Struktur organisasi baru				
		IV.PENATAAN TATALAKSANA			5	100%	
		1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama			1.5	100%	
	a	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A	1		Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki 13 Proses Bisnis yang terdiri atas 4 yang merupakan Proses Bisnis Inti, 4 Proses Bisnis Pendukung, 5 Proses Bisnis Sumber Daya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dalam Permenkominfo Nomor 1 tahun 2016. Peta bisnis proses tersebut telah ditetapkan melalui Pedoman Sekjen No. 3 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Kominfo.
	b	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A	1		Proses bisnis Kemkominfo yang terdiri dari 13 Proses Bisnis (4 Proses Bisnis Inti, 4 Proses Bisnis Pendukung, 5 Proses Bisnis Sumber Daya) telah dijabarkan dalam SOP sampai ke tingkat pelaksana (JFU/JFT) dengan berpedoman pada: 1.PM Kominfo No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemkominfo; 2.PM Kominfo No.27 Tahun 2013 tentang Penetapan SOP di Lingkungan Kemkominfo;
	c	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A	1		Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan telah diterapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan PM Kominfo 27/2013 Tentang Penetapan SOP di Lingkungan Kemkominfo; Selanjutnya untuk mendukung Peta Proses Bisnis yang baru disusun sesuai Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 maka SOP yang telah disusun dan dikelompokkan sesuai Peta Proses Bisnis dan sub proses dengan data dukung sebagai berikut: 1. SK Sekjen Kominfo tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Tahun 2017 dan SK Sekjen Kominfo Nomor 26/2018 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Laporan notulensi tahun 2017 dan 2018 3. Dokumentasi (foto) evaluasi SOP
	d	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A	1		Proses Monev peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi berdasarkan: 1. SK Tim Proses Bisnis dan SK Tim Prosedur operasional 2. Laporan Monev Peta Proses Bisnis dan Prosedur operasional secara berkala 3. Nota Dinas terkait dengan monev dan tindak lanjut peta proses bisnis dan prosedur operasional 4. Jadwal monev peta proses bisnis dan prosedur Operasional 5. Draft Permenkominfo SOTK yang baru 6. Draft Peta proses bisnis yang berubah SOTK-nya
		2. E-Government			2	100%	
	a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya	1		Kemkominfo telah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi yang ditetapkan dalam: 1. Pedoman Sekjen No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk TI di lingkungan Kemkominfo 2. Pedoman Sekjen No.1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemkominfo; 3. Kajian tentang Kelembagaan Baru PDSI sebagai CIO Kemkominfo; Rencana ini didukung oleh ketentuan mengenai : 1. Pembentukan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemkominfo PM No. 1155/2015; 2. Pembentukan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (CIO) PM No.1156/2015;

	b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government	A	1		Kebijakan internal saat ini sudah mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada semua sistem aplikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diatur dalam Rencana Induk TI Kemkominfo dan Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada bagian layanan sistem informasi disebutkan bahwa salah satunya adalah penyelenggaraan layanan integrasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah (Government Service Bus). Contoh pelaksanaan integrasi antara lain dengan 1. Integrasi secara Single Sign On (SSO) dan penggunaan sertifikat digital melalui portal Kominfo (portal.kominfo.go.id) untuk mengakses aplikasi internal, adapun data dukung untuk kriteria ini adalah Screen capture SSO portal.kominfo.go.id dan aplikasi-aplikasinya 2. Sistem manajemen kepegawaian sudah terintegrasi dengan SIMAYA, Portal Intranet, Email, K-Cloud, KMS, APIK, e-SKP, SIDARA, e-Klinik. Sistem ini dikembangkan setiap tahun untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi. Data dukung untuk kriteria ini adalah Dokumen Manual dan pengembangan Aplikasi Simpatik, dan Laporan pengembangan aplikasi SIMPATIK 3. Penerapan tanda tangan digital pada proses kenaikan pangkat dengan data dukung screenshot penerapan tanda tangan digital untuk kenaikan pangkat
	c	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A	1		Sistem pelayanan publik Kominfo telah menyediakan layanan optimalisasi, artinya sudah memiliki sistem pelayanan publik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi. data dukungnya adalah: 1. Pedoman Sekjen No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk TI di lingkungan Kemkominfo 2. Pedoman Sekjen No.1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemkominfo 3. Screen capture layanan publik kominfo terintegrasi layanan.kominfo.go.id 4. screenshot aplikasi SIMS+Host to Host dengan Bank+Machine to Machine dengan aplikasi operator selular, screenshot ISO aplikasi SIMS (layanan SDPPI) 5. screenshot layanan perizinan ppi dan kolaborasi dengan NPWP dari Ditjen Pajak 6. screenshot layanan perizinan terintegrasi aptika, dan petunjuk penggunaan layanan perizinan terintegrasi aptika 7. Layanan Pengaduan Publik Kominfo melalui layanan call center 159, dimana masyarakat bisa melaporkan aduan kinerja mengenai kominfo dan akan diinputkan oleh operator ke sistem untuk memperoleh tiket keluhan
	d	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government	A	1		Sistem pelayanan publik Kominfo telah menyediakan layanan optimalisasi, artinya sudah memiliki sistem pelayanan interaksi, transaksi, dan kolaborasi yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi. data dukungnya adalah: 1. Pedoman Sekjen No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk TI di lingkungan Kemkominfo 2. Pedoman Sekjen No.1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemkominfo 3. Screen capture layanan publik kominfo terintegrasi layanan.kominfo.go.id 4. screenshot aplikasi SIMS+Host to Host dengan Bank+Machine to Machine dengan aplikasi operator selular, screenshot ISO aplikasi SIMS (layanan SDPPI) 5. screenshot layanan perizinan ppi dan kolaborasi dengan NPWP dari Ditjen Pajak 6. screenshot layanan perizinan terintegrasi aptika, dan petunjuk penggunaan layanan perizinan terintegrasi aptika 7. Layanan Pengaduan Publik Kominfo melalui layanan call center 159, dimana masyarakat bisa melaporkan aduan kinerja mengenai kominfo dan akan diinputkan oleh operator ke sistem untuk memperoleh tiket keluhan 8. Dokumen TOR otomatisasi layanan perizinan
3. Keterbukaan Informasi Publik					1.5	100%	
	a	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya	1		Sebagai bentuk kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik, Menteri Kominfo menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemenkominfo. Secara Ex officio Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilekatkan pada Biro Hubungan Masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 117 Tahun 2010 Jo. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 356 Tahun 2014 yang telah diubah kedalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID). Masyarakat dapat mengakses PPID secara online pada ppid.kominfo.go.id dan dapat datang langsung ke Desk Layanan Informasi PPID. Dasar dan landasan operasional PPID Kemenkominfo: > Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik > Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 > Keputusan Menteri Kominfo Nomor 117 Tahun 2010 Jo. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 356 Tahun 2014 yang telah diubah kedalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) > Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika > Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika > Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik > Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar informasi Publik Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Kominfo (https://ppid.kominfo.go.id/about/landasan-operasional/)
	b	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses	A	1		Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui ppid.kominfo.go.id berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar informasi Publik Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Kominfo (https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/daftar-informasi-publik/)

	c	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A	1		PPID telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib mengumumkan hasil pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik setiap tahun yang disampaikan kepada pimpinan Badan Publik dan KPI. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada website ppid.kominfo.go.id di kanal laporan (https://ppid.kominfo.go.id/laporan/laporan-dan-evaluasi/) 1. PPID Kemkominfo mendapat peringkat ke-4 berdasarkan laporan Index Keterbukaan Informasi oleh Seknas FITRA, diterbitkan 2012; 2. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-1 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2011 dari KIP; 3. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2012 dari KIP; 4. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2013 dari KIP; 5. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014 dari KIP; 6. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 dari KIP; 7. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 dari KIP; 8. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-7 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 dari KIP; Hasil survey kepuasan IKM 2015 kategori BAIK (https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/03/laporan-ikm_2015-uptdocx.pdf) Survey IKM Tahun 2017 masih dalam proses pengolahan data
		Rencana Aksi	1. Monev Implementasi Peta Proses Bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Review SOP berdasar Proses Bisnis dan SOTK PM No. 1 Tahun 2016; 3. Penetapan PM tentang Kearsipan 4. Penguatan Peran Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kominfo (ULP dan LPSE) 5. Penguatan ZI Kominfo di Bidang Tatalaksana 6. Review Masterplan TI Kemkominfo 7. Penyusunan Tatakelola Teknis TI Kementerian Kominfo; 8. Implementasi dan Monev e-Government yang terintegrasi 9. Survei Kepuasan implementasi e-Government ; 10. Surveillance ISO/IEC 27001:2013 ISMS Keamanan Informasi Data Center, Pusat Pemulihan Bencana dan Jaringan Kemkominfo 11. Surveillance ISO/IEC 9001:2015 Quality Management Pengelolaan Presensi Absensi Kemkominfo. 12. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui SPSE sesuai target Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi 13. Pemenuhan kriteria keterbukaan informasi publik dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; 14. Survei Kepuasan Transparansi Informasi Publik;				
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)					14.36	95.72%	
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi					1	100%	
	a	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A	1		Hasil Anjab dan ABK Kementerian Kominfo sesuai dengan Permen Kominfo No 1 Tahun 2016
	b	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A	1		Hasil Anjab dan ABK Kementerian Kominfo sesuai dengan Permen Kominfo No 1 Tahun 2016
	c	Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai	Ya	1		penilaian indeks profesionalitas PNS (di lingkungan Setjen) sebagai langkah awal upaya penataan PNS, draft Analisis kesenjangan Kompetensi Nodin No. 2102/SJ.2/KP.03.02/09/2017 tentang Usul Penetapan nama pemangku jabatan
	d	Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun	Ya	1		screen shoot e-Formasi kebutuhan 5 tahun
	e	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan	a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan	A	1		Pengusulan formasi Pegawai Baru Ke Menpan Nomor B-102/M.Kominfo/Kp.02.02.02/01/2018 tentang Penyampaian Kebutuhan PNS Tahun 2018
2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN					2	100%	
	a	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan	A	1		Sejak Tahun 2016 belum ada penerimaan pegawai
	b	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.	Ya	1		Sejak Tahun 2016 belum ada penerimaan pegawai
	c	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.	Ya	1		Sejak Tahun 2016 belum ada penerimaan pegawai
	d	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ya	1		Sejak Tahun 2016 belum ada penerimaan pegawai

	e	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah	Ya	1		Sejak Tahun 2016 belum ada penerimaan pegawai
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi					1	100%	
	a	Telah ada standar kompetensi jabatan	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan	Ya	1		Draft Peraturan Menteri tentang Standar kompetensi General Generik Eselon I, II, III, IV serta Jabatan Pelaksana dan Fungsional (Sebelum adanya Permen PAN NO. 38) dan Standar Kompetensi Teknis
	b	Telah dilakukan <i>assessment</i> pegawai	a. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada seluruh pegawai b. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan <i>assessment</i> kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan <i>assessment</i> pegawai	A	1		Laporan Hasil <i>Assessment</i> kompetensi dalam rangka Talent Pool bagi pejabat Eselon II, III dan sejumlah 274 orang Eselon IV. (berita acara pelaksanaan CAT dari Tim BKN dengan Kominfo) Nodin Penganggaran CAT dan Tallent Pool tahun 2018
	c	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A	1		Daftar identifikasi kebutuhan program pengembangan kompetensi 2017-2018
	d	Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai	A	1		RKAKL Tahun 2017 serta pra DIPA Tahun 2019 terkait pengembangan Kompetensi
	e	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A	1		Tahun 2016 Biro Kepegawaian dan Organisasi telah memfasilitasi sejumlah 61 program pengembangan kompetensi terhadap 5 Unit Kerja Sejak Maret s.d Agustus Tahun 2017 telah melaksanakan fasilitasi sejumlah 46 program pengembangan kompetensi dari 7 Unit Kerja Tahun 2018 telah merencanakan fasilitasi 69 program pengembangan kompetensi dari 7 Unit Kerja Pengiriman 240 orang Peserta Diklat Manajemen Perubahan 2016 - 2017
	f	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A	1		Seluruh program pengembangan yang dilakukan melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi dilakukan movevnya di akhir tahun menggunakan Form Movev tertentu
4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka					6	100%	
	a	Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan	Ya	1		Surat Keputusan Menteri Tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya
	b	Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi	A	1		Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian JPT di Lingkungan Kominfo (Screen Shoot) seleksi: a. Administrasi b. <i>Assesment</i> c. Wawancara Penetapan hasil Seleksi Pejabat yang menempati jabatan JPT Madya ada yang berasal dari Non PNS (Screen Shoot pelamar)
	c	Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif	Ya	1		Hasil <i>Assessment</i> oleh pihak ketiga Dalam pelaksanaan seleksi, dilakukan <i>Assesment</i> dan serangkaian seleksi yang sifatnya kompetitif dan objektif (Screen Shoot pengumuman rangkaian seleksi)
	d	Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen	Ya	1		Surat Keputusan Menteri Tentang Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya
	e	Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb	Ya	1		Seluruh proses seleksi diunggah melalui Web Kominfo (Screen Shoot)
5. Penetapan kinerja individu					1.53	76.29%	
	a	Penerapan Penetapan kinerja individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan	B	0.67		Pejabat Es. I s.d IV telah memiliki PK yang kemudian diturunkan menjadi SKP Pegawai dan penilaiannya pun telah dilaporkan ke BKN dan Manpan.
	b	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	B	0.67		PK disusun berdasar Renstra

	c	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya	A	1		Penyusunan SKP terkait dengan referensi item SKP atasannya (Screen Shoot e-SKP)
	d	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A	1		dalam penetapan SKP tahunan, seluruh pegawai juga menetapkan target bulanan. Yang menjadi bahan monitoring dan penilaian perbulan. Screen Shoot e-SKP (milestone)
	e	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu	A	1		Screen Shoot e-SKP (capaian milestone)
	f	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai	B	0.67		Pelaksanaan Talent Pool menggunakan SKP sebagai nilai kinerja pegawai dan hasilnya digunakan sebagai dasar penilaian dalam PANSEL serta Baperjakat Surat Undangan Pegawai untuk mengikuti Seleksi JPT Pratama Nomor 21/SJ/KP.03.02/04/2018 tanggal 9 April 2018 Surat rekomendasi data anggota CPMO-PMO Kominfo
	g	Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai	C	0.33		Permen Kominfo No. 42 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kominfo (potongan bagi pegawai yang kinerjanya hanya cukup) Perubahan Permen Kominfo tentang Kehadiran No. 1 Tahun 2017 Bukti Pemotongan Tunjangan Kinerja perbulan berdasarkan jam kehadiran (terlambat/jjin/alpa)
6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai					0.83	83.25%	
	a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku	Ya	1		Permen Kominfo No. 25 Tahun 2011 tentang Kode Etik, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai
	b	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi	A	1		Nomor-nomor SK penetapan hukuman disiplin setiap Unit Kerja
	c	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	A	1		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan kode etik/disiplin/kode perilaku, yaitu: 1. Permen 41 tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi permen No. 1 tahun 2017 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin dan absensi pegawai, setiap bulan untuk setiap satuan kerja dan setiap pegawai.
	d	Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)	a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada unit organisasi	C	0.33		Nomor-nomor SK penetapan hukuman disiplin setiap Unit Kerja Draft SE Sekjen Tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kominfo Pemberian penghargaan terhadap peneliti berprestasi
7. Pelaksanaan evaluasi jabatan					1	100%	
	a	Informasi faktor jabatan telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan	Ya	1		Nomor-nomor SK penetapan hukuman disiplin setiap Unit Kerja Draft SE Sekjen Tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kominfo
	b	Peta jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan	A	1		Telah ditetapkan Peta Jabatan dengan Kep Men Kominfo Nomor 107 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan Kementerian Kominfo
	c	Kelas jabatan telah ditetapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan	A	1		Telah ditetapkan Kelas jabatan dengan Permen Kominfo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Kominfo
8. Sistem Informasi Kepegawaian					1	100%	
	a	Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan	Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan	Ya	1		Screen Shoot Portal, salah satunya aplikasi SIMPATIK terbaru (Sistim Informasi Manajemen Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika)
	b	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya	1		Screen Shoot dashboard SIMPATIK, setiap pegawai dapat masuk dan mengakses SIMPATIK melalui login di Portal

	c	Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan	a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organisasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian	A	1	Telah dilakukan pengembangan aplikasi yang meliputi: - penambahan fitur log event; - penambahan draft unor kolektif; - data SIMPATIK menjadi database source aplikasi lain yaitu aplikasi eSKP dan APIK; - Perubahan simpatic telah realtime ke aplikasi e-SKP; - pemberian hak akses kepada pegawai sehingga pegawai dapat mengupload dokumen pribadi ke SIMPATIK; - Data Riwayat Pegawai terus diupdate	
	d	Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Ya	1	-DRH pegawai untuk bahan baperjakt - Daftar pegawai yang akan memasuki masa pensiun - Daftar pegawai yang akan naik pangkat	
		Rencana Aksi	1. Mengusung perubahan organisasi Satker perlu mulai menyusun Anjab dan ABK sesuai Permen SOTK Baru 2. Update melalui aplikasi E-formasi April Tahun 2018 3. Melakukan Penataan Pegawai berdasar Peta jabatan 4. Akan melakukan Assessment dalam rangka Talent Pool bagi sisa Es IV di Tahun 2018 dan seluruh Pelaksana serta JFT di Tahun 2018-2019 5. Akan mengkombinasikan peninjauan program pengembangan kompetensi selain melalui AKD juga melalui hasil Assessment 6. Penambahan anggaran terkait pengembangan kompetensi 7. Pengembangan kompetensi dilakukan berdasar hasil identifikasi dan penetapan pelaksanaan sesuai anggaran 8. Melakukan dan merekap movev seluruh program pengembangan kompetensi baik yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi, Pusdiklat maupun Badan Litbang SDM setiap akhir tahun 9. Penggunaan hasil Talent Pool dan penilaian kompetensi dengan sistem CAT sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengembangan karier 10. Melakukan penyempurnaan pengukuran dan movev kinerja (e-SKP) 11. Pengupayaan sistem Tunkin dinamis 12. Pengupayaan Unit Konseling sebagai bagian dari movev disiplin				
VI. Penguatan Akuntabilitas					5.52	91.93%	
1. Keterlibatan pimpinan					1.78	89%	
	a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A	1	'Seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan renstra. Data dukung: 1. Undangan peserta penyusunan Reviu Renstra Es 1 dan PK 2. Dokumen Renstra Kemkominfo hasil reviu 3. Undangan dan laporan rapat penyusunan Reviu Renstra Ditjen Aptika 4. Dokumen Renstra Ditjen Aptika 5. Undangan penyusunan Renstra Ditjen Aptika 6. Undangan Rakor Badan Litbang 7. Laporan Rakor Balitbang 8. NT Reviu Renstra BLSDM 2015-2019 9. Dokumen Reviu Renstra BLSDM 2015-2019 10. Draf Reviu Renstra Ditjen PPI 11. Bahan Paparan Ditjen SDPPI dalam rapat reviu Renstra Ditjen SDPPI 12. Dokumen Reviu Renstra Ditjen SDPPI 13. Dokumen Reviu Renstra Ditjen IKP 14. Dokumen Reviu Renstra Setjen 15. Daftar hadir rapat penyusunan Renstra Ditjen Aptika 16. Dokumen Renstra Itjen 17. Undangan, Laggas, Daftar hadir rapat reviu renstra Ditjen Aptika 18. Bahan rapat perubahan renstra Ditjen PPI 19. Dokumen reviu renstra Ditjen PPI	
	b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	B	0.67	Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja. Data dukung: 1. Undangan Rapat penyusunan draf PK Kementerian, Es I dan II 2. Hasil Rapat penyusunan PK Kementerian, Es1 dan Es2 Tahun 2018 3. Ponter sambutan Sekjen pada rapat penyusunan PK Kementerian, Es1 dan 2 tahun 2018 4. Undangan Rapat pembahasan lanjut PK Es1 dan II Kementerian Kominfo 5. Draf PK Setjen tahun 2018 6. Laggas finalisasi PK Ditjen Aptika 2018 7. Laporan Kepala Biro Perencanaan pada acara rapat penyusunan PK Setjen 2018 8. Laporan hasil rapat penyusunan PK Ditjen IKP Tahun 2018 9. Nota Dinas Permintaan PK Satker Ditjen IKP 10. Surat izin mengadakan rapat pembahasan PK Es2 Ditjen PPI-11. Surat izin mengadakan rapat pembahasan PK Es2 Ditjen PPI-2 12. Surat izin mengadakan rapat pembahasan PK Es2 Ditjen PPI-3 13. Surat Sekjen, Penyusunan Draf PK Tahun 2018 14. Surat Tugas rapat finalisasi draf PK Ditjen Aptika 2018 15. Undangan penyusunan draf PK Ditjen Aptika 2018 16. Undangan rapat finalisasi penyusunan PK Ditjen Aptika 17. Undangan rapat finalisasi penyusunan draf PK Ditjen Aptika Tahun 2018 18. Undangan Rapat Finalisasi PK Es 1 Ditjen PPI 19. Undangan rapat pembahasan lanjut PK Es 1 dan 2 Ditjen PPI 20. Undangan rapat penyusunan PK Es 1 Ditjen PPI 21. Undangan rapat penyusunan PK Ditjen PPI, Ditjen SDPPI, dan Ditjen Aptika (26 Jan) 22. Undangan rapat penyusunan PK Ditjen IKP, Balitbang SDM, Setjen, Itjen dan PK Generik 23. Undangan rapat penyusunan PK Generik sampai Eselon 3 24. Undangan penyusunan PK Kementerian (15 Feb) 25. Pointer sambuta Sekjen pada rapat PK Kementerian (15 Feb)	
	c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1	'Seluruh pimpinan memantau capaian kinerja secara berkala Data dukung: 1. Undangan rapat capaian kinerja PK Es 1 Ditjen PPI B12 2. Laggas rapat laporan B12 Emonev PP39 dan Smart, Ditjen PPI	
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja					3.74	93.4%	
	a	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A	1	Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Data dukung: 1. Bahan paparan Kempan dan RB tentang Cascading Deputy Kempan dan RB 2. Bahan paparan Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Sambutan Sekjen pada acara Rapat Akuntabilitas Kinerja Kementerian (studi banding dg KKP) 4. Undangan Rapat Akuntabilitas Kinerja Kementerian 5. Undangan Workshop cascading Kinerja	
	b	Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun	Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja	Ya	1	Ya Data dukung: 1. Lampiran Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2015 2. Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kementerian Kominfo 3. screenshot buku Pedoman SAKIP Kementerian Kominfo	

	c	Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik	a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik	B	0.67		Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi Data dukung: 1. Dashboard pemantauan 2. Halaman depan e-siresix (e-monev)
	d	Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit	a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi	A	1		Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi Data dukung: 1. Screenshoot dashboard e-monev kemkominfo 2. Screenshoot halaman depan e-monev kominfo 3. reenshoot eMonev PP39 4. Screenshoot SMART DJA
	e	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A	1		'Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan Data dukung: 1. Capaian PK B03 2. Capaian PK B06 3. Capaian PK B09 4. Capaian PK B012 5. Permintaan Kinerja Bulanan 6. Laporan pemantauan program prioritas (8 Des 2017) 7. Laporan pemantauan program prioritas (30 Nop 2017) 8. Laporan pemantauan program prioritas (24 Nop 2017)
	Rencana Aksi		- Background study penyusunan Renstra Kemkominfo 2020-2025 - Menyusun indikator kinerja eselon III dan IV dan menuangkannya ke dalam SKP - Penyampaian pelaporan kinerja secara priodik berbasis online dan terintegrasi - Pengembangan sistem PMO (Project Mmanagement Officer) - Peningkatan sinergitas antar satker dalam budaya organisasi - Peningkatan kapasitas pengelola akuntabilitas kinerja di satuan kerja melalui rapat-rapat koordinasi				
VII. PENGUATAN PENGAWASAN					11.75	97.92%	
1. Gratifikasi					1.5	100%	
	a	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Ya	1		Surat Edaran Sekjen No 13/SJ/SE/KOMINFO/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kominfo; Dokumentasi kegiatan finalisasi pedoman Gratifikasi antara Kementerian dengan KPK berupa foto, undangan, daftar hadir, dan hasil finalisasi pedoman; Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
	b	Telah dilakukan public campaign	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	A	1		1. Foto Penayangan Konten anti gratifikasi secara berkala di TV Plasma. 2. Foto banner anti gratifikasi yang diletakkan di tempat-tempat strategis.
	c	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi	Ya	1		1. SK Menteri Kominfo No 686 tahun 2014 tentang Pembentukan UPG di lingkup Kementerian Kominfo. 2. Laporan penerimaan Hadiah / Fasilitas UPG ke KPK
	d	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya	1		Laporan Monitoring dan Evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi
	e	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya	1		1. Surat Undangan TOT dan Penunjukan Petugas UPG Itjen 2. Notulensi, Foto, Daftar Hadir, materi Rapat dengan KPK (sebelum dan sewaktu TOT) 3. Draft Pedoman Penanganan Gratifikasi (undangan ke satker, surat tugas, daftar hadir)
2. Penerapan SPIP					1.5	100%	
	a	Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Ya	1		Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP
	b	Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian	A	1		Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kominfo Tahun 2017
	c	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko	A	1		Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kominfo Tahun 2017
	d	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A	1		Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kominfo Tahun 2017
	e	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A	1		1. Undangan Nomor 1497/SJ/PR.01.02/09/2016 tanggal 14 September 2016 dalam rangka monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang / jasa serta penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kominfo. 2. Undangan Plt. Sekretaris Itjen Nomor 490/IJ.1/PW.01.06/09/2016 tanggal 19 September 2016 tentang undangan sebagai peserta pengisian kuisioner persepsi penerapan SPIP dalam rangka Penilaian Mandiri SPIP. 3. Laporan hasil self assessment atas tingkat maturitas SPIP di Kementerian Kominfo tahun 2016 (tergambar di dalamnya bahwa seluruh satker telah melakukan pengendalian untuk tiap unsur SPIP). 4. Undangan Sekjen untuk sosialisasi SPIP hasil dari penilaian BPKP

	f	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A	1		1. Laporan hasil self assessment atas tingkat maturitas SPIP di Kementerian Kominfo tahun 2016 (tergambar di dalamnya bahwa seluruh satker telah melakukan pengendalian untuk tiap unsur SPIP). 2. Pengendalian intern diantaranya yang mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan telah dilakukan pemantauan atau monitoring secara intensif, termasuk dengan BPK, BPKP dan tim Task Force Go WTP Kementerian, guna memberikan keyakinan memadai dalam pelaksanaan kegiatan yang 3E, kehandalan pelaporan, keamanan aset dan kepatuhan pada UU. 3. Laporan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kominfo Tahun 2017 4. Laporan monitoring tindak lanjut evaluasi maturitas SPIP Tahun 2017.
3. Pengaduan Masyarakat					2	100%	
	a	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan	Ya	1		1. Keputusan Irjen No. 28 Tahun 2013 mengenai SOP Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan 2. Aplikasi Pengaduan Masyarakat pada Website Kominfo (dumas.kominfo.go.id) 3. Bukti Pelaksanaan Penyusunan Pedoman: -Draft Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian -Undangan, Notulen, daftar hadir dan foto kegiatan pembahasan materi pedoman pengaduan masyarakat 4. Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian
	b	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	A	1		1. Daftar Unit Layanan Pengaduan Masyarakat yang ada di Kementerian Kominfo 2. SK Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kominfo 3. Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Satuan Kerja
	c	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti	A	1		1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Trimester I
	d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Trimester I
	e	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya	1		Undangan, daftar hadir, notulensi rapat rencana integrasi penanganan aduan masyarakat di lingkungan Kemkominfo
4. Whistle-Blowing System					1.5	100%	
	a	Telah terdapat Whistle Blowing System	Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System	Ya	1		KepMen Kominfo No 656 Tahun 2014 tentang pembentukan tim penyelenggara sistem pengaduan orang dalam (WBS) dalam pengadaan Barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Kominfo Bukti Pelaksanaan Penyusunan Pedoman: -Draft Pedoman WBS di lingkungan Kementerian -Undangan, Notulen, daftar hadir dan foto kegiatan pembahasan materi pedoman penanganan WBS 4. Pedoman Penanganan WBS di lingkungan Kementerian Kominfo
	b	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi	A	1		1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi WBS tanggal 2-3 Mei 2014 di Bekasi 2. Link Aplikasi WBS telah dimuat di dalam website Kemkominfo. 3. Sosialisasi WBS melalui TV Plasma
	c	Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan	Ya	1		Hasil Screenshoot Aplikasi WBS pada fitur dan form inputan serta reporting WBS yang diterima SK Penunjukan Pengelola WBS
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System	A	1		1. Laporan Monitoring dan Evaluasi WBS Trimester I
	e	Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	A	1		Reporting Progres Perbaikan Sistem WBS Surat Undangan dan Penugasan Pembahasan Perbaikan Sistem WBS
5. Penanganan Benturan Kepentingan					1.5	100%	
	a	Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Ya	1		Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan.
	b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	A	1		1. Bukti Sosialisasi dan pemetaan penanganan benturan kepentingan di kantor Kementerian Kominfo (Materi, daftar hadir, foto dokumentasi), 2. Bukti Sosialisasi Hasil Pemetaan Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai dalam bentuk surat edaran hasil pemetaan
	c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya	1		Telah dilakukan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Inspektoral Jenderal sebagai unit pengawasan (Penolakan Auditor Tjen untuk ikut duduk sebagai Panitia Pelaksana KTT luar biasa OKI bulan Maret 2016, mengingat Tjen sebagai tim pendamping/pengawas)
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi	A	1		Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kemkominfo TA 2017.

	e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti	A	1		Surat permintaan kepada Satker untuk melakukan pemetaan benturan kepentingan.
6. Pembangunan Zona Integritas					2.25	90%	
	a	Telah dilakukan pencanangan zona integritas	Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan	Ya	1		Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 6 Januari 2016.
	b	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan	Ya	1		Surat Keputusan Sekjen Tentang Penetapan Unit Yang akan dikembangkan menjadi zona integritas Nomor 80 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016
	c	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A	1		SK Sekjen No 79 Tahun 2016 tanggal 4 April 2016 terkait Penetapan Tim Kerja Pembangunan ZI SK Tim Penilai Internal Laporan Hasil Penilaian Internal Tahun 2017 Laporan Hasil Penilaian Internal Tahun 2018 Surat Usulan Penetapan WBK Satuan Kerja Direktorat Operasi ke Menpan
	d	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi	A	1		1. SK TIM Penilai Internal 2. Laporan Hasil Pra Penilaian Internal Pelaksanaan ZI. 3. Hasil Penilaian Tim Penilai Internal 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Pokja Penguatan Pengawasan terhadap Satker yang ditentukan menuju WBK
	e	Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK	B	0.5		Surat Usulan Penetapan predikat menuju WBK
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					1.5	100%	
	a	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir	A	1		Laporan Ikhtisar APIP Semester II 2016, Bab Hasil Pemantauan TL APIP Tahun 2016 Laporan Ikhtisar APIP Semester II 2017, Bab Hasil Pemantauan TL APIP Tahun 2017
	b	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas	A	1		1. Dokumen Peta kompetensi VS analisis kebutuhan
	c	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran	A	1		DIPA Inspektorat Jenderal 2018 Usulan Anggaran Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2019 Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 2018 Audit Charter Inspektorat Jenderal
	d	APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko	A	1		1. PKPT Inspektorat Jenderal berbasis risiko 2. Audit Universe 3. Peta Audit 4. Audit Charter Inspektorat Jenderal 5. ISO Manajemen Mutu 9001:2015 dimana perencanaan auditnya harus berbasis risiko yang dinyatakan dalam pernyataan mutu.
Rencana Aksi			1. Internalisasi/Sosialisasi/Public Campaign Penanganan Gratifikasi, Whistle Blowing System, Pengaduan Masyarakat dan Benturan Kepentingan 2. Pengusulan Pilot Project Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ke Kementerian PAN & RB 3. Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP 4. Peningkatan Kapabilitas APIP bersama BPKP				
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					5.83	97.23%	
1. Standar Pelayanan					1	100%	
	a	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan	Ya	1		Terdapat Keputusan Menteri Kominfo No. 555 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kominfo dan Instruksi Menteri Kominfo No.2 Tahun 2013 tentang tanggal 17 Juni 2013 tentang Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, serta Pengelolaan Pengaduan, Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Standar Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri dan Kepdirjen terkait, yang dijabarkan dalam Standar Pelayanan di masing-masing unit layanan. Saat ini sedang dilakukan revisi terhadap KM 555 Tahun 2013 dengan melakukan inventarisasi terhadap jenis-jenis layanan publik yang belum masuk dalam daftar layanan, dilengkapi dengan matriks komponen standar pelayanannya. 1. Keputusan Menteri Kominfo No.555 Tahun 2013 2. Instruksi Menteri Kominfo No. 2 Tahun 2013 3. Matriks Daftar Pelayanan Publik dan Komponen Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Standar Pelayanan seluruh layanan

	b	Standar pelayanan telah dimaklumkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan	A	1		Masing-masing satker penyelenggara layanan memiliki Standar Pelayanan 1. Standar Pelayanan seluruh layanan 2. Maklumat Layanan pada satuan kerja penyelenggara layanan
	c	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A	1		Seluruh satker penyelenggara layanan memiliki SOP. 1. SOP Pelayanan pada seluruh satker penyelenggara layanan
	d	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A	1		"Review dan perbaikan dilakukan terhadap pelayanan perizinan 1. Laporan bulanan evaluasi proses perizinan " 2. Keputusan Menteri tentang pendelegasian kewenangan 3. Keputusan Dirjen tentang pendelegasian kewenangan
	e	Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP	A	1		" Telah dilakukan reviu dan perbaikan SOP, utamanya untuk layanan yang telah memiliki ISO, evaluasi dilakukan secara berkala 1. Hasil evaluasi SOP " 2. Laporan bulanan evaluasi proses perizinan
2. Budaya Pelayanan Prima					0.83	83.4%	
	a	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	A	1		Pelatihan budaya pelayanan dilakukan melalui pelaksanaan diklat di tingkat Kementerian dan in-house training di satker penyelenggara layanan
	b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media	A	1		"Masyarakat dapat mengakses layanan di lingkungan Kemkominfo melalui: website: http://www.kominfo.go.id/content/all/layanan_kominfo . Atau melalui alamat situs per layanan, yaitu : http://ditel.kominfo.go.id , http://bpptik.kominfo.go.id , www.postel.go.id , www.simponippi.go.id , helpdesk.layanan.go.id , http://bbppt.postel.go.id/layanan/ http://e-penyiaran.kominfo.go.id , http://muspen.kominfo.go.id , www.mmtc.ac.id , mpn.kominfo.go.id , ppid.kominfo.go.id , http://pusdiklatkominfo.wordpress.com . Masyarakat juga dapat mengakses layanan melalui Media Sosial (Facebook dan Twitter) di : Layanan SDPPI, @layananSDPPI, @dit_penyiaran, @muspen_tmii, Museum Penerangan, dan Direktorat Penyiaran " 1. Leaflet/brosur 2. Capture Website 3. Penayangan Public Service Advertisement di media TV tentang layanan
	c	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	B	0.5		"Telah disusun kebijakan tentang reward dan punishment " 1. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 2. Sertifikat penghargaan kepada petugas layanan 3. Draft SE Sekjen tentang pemberian penghargaan dan pengananan sanksi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Kominfo
	d	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu	B	0.67		"a). Terdapat Layanan terpadu di masing-masing Direktorat Jenderal. b). Kementerian Kominfo tergabung dalam PTSP Pusat di BKPM sesuai Permenkominfo No.40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala BKPM. Sejak tahun 2015, setiap semester 3 orang pejabat/pelaksana bertugas di BKPM. " 1. Foto Layanan Terpadu Ditjen SDPPI 2. Foto Layanan Terpadu Ditjen PPI 3.Peraturan Menteri Kominfo No.40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kominfo kepada Kepala BKPM 4. Keputusan Menteri Kominfo No.1036 Tahun 2015 tentang Penugasan Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Perizinan Teknis di BKPM dalam Bidang Kominfo 5. Integrasi layanan dengan BKPM 6. PKS antara Dirjen PPI Kemkominfo dan Dirjen AHU Kemkumham 7. PKS Ditjen PPI - Ditjen DUKCAPIL 8. PKS Ditjen PPI - Ditjen Pajak 9. MoU Mendagri dan Menkominfo No. 172 tentang Kerjasama pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik dalam layanan bidang Kominfo
	e	Terdapat inovasi pelayanan	Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan	Ya	1		"a. Pada Kompetisi Inovasi Layanan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo mengajukan 2 (dua) inovasi. " b. Pengembangan layanan terpadu satu pintu Ditjen PPI 1. Undangan, Absensi, Laporan rapat persiapan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 2. Nota Dinas Laporan Keikutsertaan pada "Kompetisi Inovasi Layanan Publik Tahun 2018" yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. 3. Capture keikutsertaan Kemkominfo pada Kompetisi Inovasi Layanan Publik melalui Sinovik KemenpanRB 4. Paparan layanan prima Ditjen PPI
3. Pengelolaan Pengaduan					1.5	100%	

	a	Terdapat media pengaduan pelayanan	Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka	Ya	1	"Terdapat kotak saran, kontak pengaduan via email, telepon dan fax di masing-masing layanan. Serta pengaduan melalui media sosial (twitter dan facebook) yaitu: Layanan SDPPI, @layananSDPPI, @dit_penyiaran, @muspen_tmii, Museum Penerangan, dan Direktorat Penyiaran (Ditjen PPI, Kementerian Kominfo). Selain itu terdapat contact center : 159 untuk pelayanan prima PPI, 30003100 untuk pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio, call center PPID 021-3452841 untuk pelayanan informasi, Call Center Helpdesk Direktorat E-Government di no. 021-34116308 untuk layanan nama domain, call center 159 untuk pelayanan pos dan telekomunikasi. " 1. Foto Kotak Saran 2.Capture email pengaduan 3.Foto Contact Centre 30003100
	b	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan	A	1	Telah terdapat SOP Penanganan Pengaduan: 1. SOP Pengaduan Masyarakat (APTIKA) 2. SOP Penanganan Pengaduan di Lingkungan Ditjen SDPPI 3.SOP Pengelolaan Pengaduan di Monumen Pers 4. SOP Penanganan Pengaduan MMTC 5. SOP Penanganan Pengaduan Pusdiklat 6. SOP Penanganan Pengaduan Ditjen PPI
	c	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan	Ya	1	Pengaduan untuk Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio melalui Call Center 021-30003100, Pelayanan PPID di 021-3452841, Pelayanan Nama Domain di 021-3849366, Pelayanan (PPI) Call Center 159. 1. Foto Contact Center 30003100 Ditjen SDPPI 2. Foto Pelayanan Prima Ditjen PPI 3. Foto Helpdesk PSE
	d	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	A	1	"Persentase jumlah pengaduan yang berhasil diselesaikan berkisar antara 98,69 % s/d 100% dari jumlah pengaduan " 1. Data Statistik Contact Center 2.Laporan Bulanan Contact Center 3. Rekapitulasi pengaduan 4. Tindaklanjut pengaduan
	e	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan	A	1	"Evaluasi telah dilakukan untuk memperbaiki penanganan pengaduan " 1.Laporan Pelaksanaan Contact Center 2. Evaluasi penanganan pengaduan
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan					1.5	100%
	a	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1	a). Pelaksanaan survey di satker penyelenggara layanan Tahun 2016 1. Hasil Survey Ditjen SDPPI (4 layanan) : Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi 2. Hasil Survey jasa dan jaringan Telekomunikasi 3. Hasil survey Layanan Nama Domain 4. Hasil Survey Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik 5. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
	b	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah	Ya	1	Hasil survei dapat diakses melalui website: http://www.postel.go.id/publikasi-hasil-survei-tahunan-69 http://dittel.kominfo.go.id/kuisisioner/hasil-kuisisioner/ https://pse.kominfo.go.id 1. Capture Link Hasil Survei di Website
	c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A	1	"Terdapat matriks tindaklanjut hasil survey kepuasan masyarakat " 1. Undangan dan Absensi Rapat Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Survey 2. Undangan rapat, Laporan Pelaksanaan FGD 3. Laporan Tindaklanjut hasil survei
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi					1	100%
	a	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Ya	1	Penerapan teknologi telah dilakukan pada unit layanan dengan adanya e-licensing untuk perizinan spektrum frekuensi radio, perizinan penyelenggaraan penyiaran, perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, pelayanan nama domain, dan e-sertifikasi perangkat telekomunikasi. Selain itu, pengembangan modul machine to machine untuk pertukaran data 1.Dokumen Rencana pengembangan TI pada satker penyelenggara layanan
	b	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A	1	"Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi. Website dari seluruh unit layanan : http://dittel.kominfo.go.id , http://bpptik.kominfo.go.id , www.postel.go.id , http://bbppt.postel.go.id/layanan http://e-penyiaran.kominfo.go.id , http://muspen.kominfo.go.id , www.mmtc.ac.id , mpn.kominfo.go.id , ppid.kominfo.go.id , http://pusdiklatkominfo.wordpress.com . http://simponippi.go.id https://pse.kominfo.go.id/helpdesk.layanan.go.id Beberapa layanan terkait perizinan telah menerapkan aplikasi e-licensing, yaitu :SIMS untuk perizinan spektrum frekuensi radio, SIMP3 untuk perizinan penyiaran, SIP2TEL untuk pengujian perangkat telekomunikasi, dan e-licensing untuk perizinan penyelenggaraan telekomunikasi. Di samping itu diterapkan Host to Host untuk pembayaran BHP Frekuensi Radio, dan pengembangan Machine to Machine dalam pertukaran data. 1. Capture Website dari semua penyelenggara layanan 2. Dokumen Host to Host 3. Rencana Pengembangan Sistem Machine to Machine " 4. Paparan Pelayanan Prima Ditjen PPI
	c	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A	1	"Perbaikan dilakukan terus menerus terhadap aplikasi layanan perizinan " 1. Roadmap pengembangan sistem Machine to Machine pelayanan spektrum frekuensi radio 2. Paparan Pelayanan Prima Ditjen PPI 3. Roadmap pengembangan standar pelayanan publik 4. Capture Website lama dan website baru perizinan online pos dan telekomunikasi 5. Laporan penggunaan aplikasi MANTRA

	Rencana Aksi	1. Revisi KM No. 555 Tahun 2013 tentang pelayanan publik 2. Kompetisi Inovasi Layanan Publik 2018 3. Pengelolaan Pengaduan 1 pintu 4. Implementasi SE Sekjen tentang Reward and Punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi pada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat 6. Pelayanan terintegrasi Kominfo				
B.HASIL			29.96	74.9%		
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI			12.99	64.93%		
	1.Nilai Akuntabilitas Kinerja	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (0 - 100)	66.44	9.3		Hasil evaluasi AKIP sesuai Surat Menteri PAN dan RB No. B/613/M.AA.05/2018 tanggal 26 Februari 2018
	2.Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi (0 - 5)	3.07	3.684		Hasil evaluasi RB Tahun 2017 sesuai Surat Menteri PAN dan RB No. B/10/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018
	Rencana Aksi	1. Melakukan kembali Survey Internal untuk TA 2018 2. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja dari level Instansi/pimpinan/kepala unit kerja sampai dengan indikator kinerja di level individu pegawai dengan memperhatikan proses bisnis yang ada; 3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran. 4. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, agar mampu mewujudkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi. 5. Meningkatkan kualitas penyajian informasi pelaporan kinerja yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran. 6. Menghubungkan reward and punishment dalam capaian kinerja organisasi dan individu.				
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN			8.95	89.5%		
	1.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi (0 - 4)	3.4	5.95		Hasil evaluasi RB tahun 2017 sesuai Surat No. B/10/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018
	2.Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian WTP-Dengan Paragraph Penjelas Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat Tidak Wajar Tidak Memiliki Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	3		LHP BPK RI No. 66.A/HP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017
	Rencana Aksi	Melakukan kembali survey persepsi untuk TA 2018				
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			8.03	80.25%		
	1.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 - 4)	3.21	8.025		Hasil evaluasi RB Tahun 2017 sesuai Surat Menteri PAN dan RB No. B/10/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018
	Rencana Aksi	Melaksanakan Survey Eksternal Persepsi Kualitas Pelayanan TA 2018				
INDEKS RB (Total)			88.42			

*) Tahap Penilaian :

1. Masih dalam proses koordinasi penilaian atau perbaikan penilaian di ispektorat
2. Sudah disampaikan ke Ketua Tim RB Instansi
3. Sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB